



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI  
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS, DAN BPWS)**

---

Tahun Sidang	: 2011 – 2012
Masa Sidang	: IV
Rapat	: Ke – 26 (dua puluh enam)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Selasa, 10 Juli 2012
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 14.45 wib s.d 17.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (KK V)
Acara	: Pembahasan Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Kegiatan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2013.
Ketua Rapat	: H. Muhidin M. Said, SE, MBA
Sekretaris	: Sartomo, SS
Hadir Anggota	: dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan beserta jajaran.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Ketua Rapat membuka rapat pukul 14.45 wib setelah kuorum terpenuhi, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Dalam pengantarnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada hari ini adalah dalam rangka Pembahasan Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Kegiatan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2013.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan penjelasan dan paparannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi V DPR RI akan mendalami lebih lanjut program/kegiatan yang disampaikan pada RKP 2013, dengan alokasi anggaran pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menjadi sebesar Rp. 8.840 Miliar, dari kebutuhan Rp. 17.960 Miliar.
2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan agar menerapkan penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan melakukan seleksi usulan secara ketat, sehingga tidak ada lagi program/kegiatan yang diragukan *outcome*-nya dalam usulan pada Tahun Anggaran 2013.
3. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan agar selektif mengusulkan pekerjaan jasa konsultansi (non fisik) dengan *outcome* yang terukur serta dalam pemaketan pekerjaannya mempertimbangkan ketersediaan tenaga ahli.
4. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan agar memeriksa paket pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2011 dan menerapkan mekanisme penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) termasuk pemberian *blacklist* pada penyedia jasa sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk melakukan percepatan pembangunan konektivitas domestik melalui penajaman skala prioritas program/kegiatan Tahun Anggaran 2013.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.30 WIB.

**DIRJEN PERKERETAAPIAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**TTD**

**TUNDJUNG INDERAWAN**

Jakarta, 10 Juli 2012  
**KETUA RAPAT,**

**TTD**

**MUHIDIN M. SAID**